

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada tahun 2015, perusahaan elektronik terbesar asal Jepang, Toshiba Corporation, terlibat dalam kasus penggelembungan laba perusahaan sebesar USD 1,2 miliar yang dilakukan secara sistematis sejak tahun 2008 oleh pimpinan puncak perusahaan (Sukmana & Primus, 2015). Menurut tim audit eksternal Toshiba, target laba yang ditetapkan manajemen perusahaan tidak realistis, sehingga mendorong manipulasi data laporan keuangan pada setiap divisi Toshiba. Akibatnya, di akhir tahun 2015 Toshiba mencatat kerugian yang sangat besar yaitu USD 8 miliar dan diharuskan merevisi laba perusahaan dalam 3 tahun terakhir (Sukmana & Primus, 2015). Di Indonesia sendiri, kasus manipulasi laba yang melibatkan perusahaan besar juga kerap terjadi. Pada tahun 2019, PT. Garuda Indonesia diharuskan untuk melakukan perbaikan dan penyajian kembali (*restatement*) laporan keuangan tahun 2018, serta melakukan pemaparan publik (*public expose*) oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) karena mengakui piutang atas kontrak kerjasama yang berlaku 15 tahun sebagai pendapatan di tahun pertama, sehingga pada tahun 2018 Garuda Indonesia mencatat laba bersih yang meningkat tajam jika dibandingkan kerugian yang dicatat pada laporan keuangan tahun sebelumnya (Samuel Pablo, 2019). Sementara itu, ditemukan *overstatement* piutang yang cukup tinggi pada laporan keuangan tahun 2017 milik perusahaan makanan PT. Tiga Pilar Sejahtera Tbk, yang dilakukan dengan cara mencatat enam distributor afiliasi perusahaan sebagai pihak ketiga (Soenarso & Tendi Mahadi, 2021).

Berbagai kasus di atas dapat menjadi gambaran bagaimana manajemen puncak dapat melakukan berbagai cara agar laba terlihat menggiurkan bagi pemangku kepentingan. Terungkapnya kasus-kasus tersebut tentu menghebohkan publik dan memunculkan anggapan bahwa manajemen laba dilakukan sebagai tindakan oportunistik para manajer untuk mengejar kepentingan pribadi mereka (Suyono, 2017). Healy & Wahlen (1999) menyatakan bahwa manajemen laba merupakan tindakan manipulatif dari manajemen untuk menyesatkan pemangku kepentingan atas informasi kinerja perusahaan. Misalkan pada suatu kondisi

dimana pihak manajemen ternyata tidak berhasil mencapai target laba yang ditentukan, mereka bisa saja memanfaatkan celah yang diperbolehkan dalam akuntansi untuk melakukan manajemen laba (Sukaesih & Risma, 2014). Dengan begitu, manajemen laba berpotensi merugikan investor karena laba yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi realitanya/riil sehingga dapat menyebabkan penurunan kinerja perusahaan dimasa yang akan datang.

Sebagai manajemen puncak, latar belakang komisaris dan direksi berpengaruh besar dalam kebijakan penyusunan laporan keuangan yang akan mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan (Widodo & Fanani, 2020). Direksi memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola kekayaan perusahaan dan bertindak sebagai pengambil keputusan strategis sesuai dengan tujuan perusahaan, sedangkan komisaris memiliki tugas pengawasan guna mewakili kepentingan pemegang saham. Walaupun komisaris tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional perusahaan, namun komisaris juga bertugas untuk memberikan nasihat terkait kebijakan direksi dalam penyelenggaraan perusahaan (Nugroho & Eko, 2011). Dapat dikatakan bahwa Direksi dan Komisaris merupakan organ penting yang menentukan arah perusahaan.

Melalui teori *upper echelons*, Hambrick & Mason (1984) mengemukakan bahwa karakteristik pemimpin perusahaan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja perusahaan. Dengan kata lain, manajer puncak yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik, strategi pengelolaan perusahaan yang bagus, serta pengambilan keputusan yang tepat dapat membawa perusahaan pada performa terbaik. Dalam jurnalnya, Nasih, dkk. (2019) mengungkapkan bahwa personel militer cenderung memiliki karakter disiplin, memiliki jiwa kepemimpinan yang hebat, serta efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas. CEO dengan pengalaman militer terbiasa mengambil keputusan di bawah tekanan dan mengendalikan perusahaan dengan baik saat periode krisis (Benmelech dan Frydman, 2015). Dengan karakteristik tersebut, penempatan komisaris dan direksi dengan latar belakang militer mampu meningkatkan nilai pada perusahaan (Lin, dkk., 2011).

Penelitian yang dilakukan Harymawan (2018) dan Lin, dkk. (2011) membuktikan bahwa perusahaan terkoneksi militer mendapatkan perlakuan

istimewa dengan membayar bunga pinjaman yang lebih rendah dan tingkat pengembalian saham akuisisi yang lebih tinggi. Pemimpin dengan pengalaman militer menunjukkan lebih taat kepada regulasi dan meminimalisir kemungkinan *fraud* (Benmelech & Frydman, 2015). Sependapat dengan pernyataan tersebut, Koch-Bayram & Wernicke (2018) mengungkapkan bahwa CEO berlatar militer kurang terlibat dalam kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini didukung dengan penelitian Law & Mills (2017) dimana CEO berlatar belakang militer lebih rendah terlibat dalam penghindaran pajak perusahaan dan meminimalkan penggunaan *tax havens* (Law & Mills, 2017).

Kecenderungan karakteristik positif pemimpin yang terbentuk pengalaman militer sebagaimana dijelaskan pada penelitian terdahulu belum tentu terlibat dalam tingkat manajemen laba yang rendah. Melalui penelitian yang dilakukan oleh Lai, dkk. (2020) di China menggunakan pengukuran manajemen laba berbasis akrual dan berbasis aktivitas, ditemukan bahwa perusahaan dengan pimpinan berlatar belakang militer memiliki tingkat manajemen laba yang lebih tinggi. Menurut Lai, dkk. (2020) hal ini bisa saja terjadi karena pimpinan berlatar belakang militer memiliki kepercayaan diri tinggi dan lebih suka mencari risiko. Manajer yang terlalu percaya diri cenderung melakukan lebih banyak manajemen laba untuk mencapai target laba dan cenderung lebih besar menghadapi risiko keuangan (Hribar & Yang, 2016 ; Malmendier, dkk. 2011).

Di Indonesia, penelitian mengenai hubungan latar belakang belakang militer terhadap manajemen laba pernah dilakukan oleh Widodo & Fanani (2020) pada 50 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2018, dan hasilnya adalah latar belakang militer tidak berhubungan pada kualitas laba tetapi berhubungan positif terhadap kualitas audit. Widodo & Fanani (2020) mengungkapkan bahwa kualitas laba tidak dipengaruhi oleh latar belakang militer, melainkan dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan itu sendiri. Penelitian lainnya mengenai militer pernah dilakukan Nasih, dkk. (2019) dengan mengamati 110-tahun perusahaan selama periode 2013-2017 dan disimpulkan bahwa perusahaan dengan koneksi militer cenderung terlibat dalam keputusan etis dengan memberikan lebih banyak pengungkapan CSR (*corporate social responsibility*).

Hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda mendorong penulis untuk mengevaluasi kembali hubungan latar belakang militer pada manajemen laba di Indonesia dengan memperluas jenis sampel dan tahun pengamatan. Dalam jurnal Widodo & Fanani (2020) disebutkan bahwa selain di sektor pertambangan, personel militer juga menduduki jabatan strategis dalam berbagai sektor industri lainnya seperti perbankan, perkebunan, perdagangan, manufaktur dan sebagainya. Dengan memperluas jenis sampel dan tahun pengamatan, diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih kuat mengenai hubungan latar belakang militer dengan manajemen laba. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan adalah seluruh sektor perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kecuali sektor keuangan tahun 2015-2020. Perusahaan sektor keuangan tidak termasuk dalam pengamatan karena memiliki pengungkapan laporan keuangan yang berbeda dengan perusahaan sektor lainnya berdasarkan peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sehingga tidak dapat dibandingkan. Alasan tahun 2015 – 2020 dipilih dalam pengamatan ini karena data tersebut merupakan data terbaru. Adapun tahun 2020 dimasukkan dalam pengamatan karena terjadi bencana nasional pandemi *covid-19* yang menyebabkan tren penurunan penjualan pada sebagian besar sektor industri. Dengan tren penurunan penjualan tersebut, penulis berasumsi bahwa pimpinan puncak perusahaan banyak melakukan manajemen laba untuk memenuhi target laba perusahaan.

Di Indonesia sendiri, peran militer dalam bidang politik dan ekonomi masih cukup besar (Nasih, dkk., 2019). Pada tahun 2020, Menteri BUMN Erick Thohir melakukan perombakan struktur perusahaan BUMN dengan menempatkan sebanyak 22 personel TNI dan Polri pada jabatan komisaris dan direksi. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, tercatat 75 orang personel militer menduduki jabatan *top management* perusahaan BUMN (Pratama & Jatmiko, 2020). Tak hanya perusahaan BUMN, cukup banyak pula perusahaan swasta yang memilih komisaris dan direksi berlatar belakang militer dalam pengelolaan perusahaan. Menteri BUMN Erick Thohir berasalan bahwa personel militer memiliki kemampuan khusus dalam menyelesaikan konflik-konflik perusahaan seperti perijinan, masalah hukum, dan masalah keuangan (Pratama & Jatmiko, 2020). Sependapat dengan hal tersebut, menurut Harymawan (2018)

perusahaan tertarik menunjuk militer sebagai komisaris atau direksi sebagai langkah alternatif untuk mengelola perusahaan dengan lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris bagaimana hubungan manajemen laba perusahaan dengan komisaris dan direksi berlatar belakang militer. Manajemen laba penting untuk diteliti karena berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, dimana semakin tinggi tingkat manajemen laba maka semakin rendah kualitas laporan keuangan tersebut, karena informasi yang terkandung di dalamnya tidak menunjukkan kondisi riil dari perusahaan dan dapat menyesatkan pemangku kepentingan. Dengan begitu, para investor serta pemangku kepentingan lainnya mampu mengevaluasi informasi laba dalam laporan keuangan perusahaan yang dikeluarkan oleh perusahaan terkoneksi militer.

Menggunakan model Jones dimodifikasi (Dechow, dkk., 1995) untuk mengukur akrual diskresioner sebagai proksi manajemen laba, hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang tidak memiliki hubungan secara signifikan dengan tingkat manajemen laba perusahaan. Uji ketahanan menggunakan model pengukuran akrual diskresioner lainnya yaitu model Kothari (2005) juga telah dilakukan. Uji ketahanan menunjukkan hasil yang sama dengan pengukuran model Jones dimodifikasi (Dechow, dkk., 1995). Hasil ini sejalan dengan penelitian Widodo & Fanani (2020) yang menyatakan bahwa latar belakang militer tidak berhubungan dengan kualitas laba. Penulis berpendapat bahwa hasil tersebut didapat karena mantan personel militer lebih banyak menduduki jabatan dewan komisaris yaitu 95%, dimana komisaris tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam keputusan keuangan perusahaan.

Selanjutnya, penulisan dalam penelitian ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut. Penjelasan mengenai latar belakang penelitian, kesenjangan penelitian, batasan penelitian, serta tujuan dan kontribusi penelitian akan dibahas dalam Bab 1. Penguraian teori, hasil penelitian sebelumnya, dan hipotesis yang akan diuji akan dituangkan dalam Bab 2. Bab 3 berisi penjelasan mengenai pendekatan penelitian, populasi dan sampel, identifikasi variabel beserta operasional dan pengukurannya, dan pengujian yang digunakan. Bab 4

berisi pembahasan hasil dari analisis data. Terakhir, kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran tercantum dalam bab 5.